KOLABORASI RISET
DOSEN DAN MAHASISWA

PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA BANK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN DI INDONESIA

ARTIKEL ILMIAH

Oleh :

Giovani Virza Amallia
2015210573

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	:	Giovani Virza Amallia
Tempat, Tanggal Lahir	:	Surabaya, 14 Mei 1997
N.I.M	:	2015210573
Program Studi	:	Manajemen
Program Pendidikan	:	Sarjana
Konsentrasi	:	Manajemen Keuangan
Judul	:	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan di Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal:

(Dr. Muazaroh, SE., MT)

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen
Tanggal:

(Burhanudin, SE., M.Si., Ph.D)

PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA BANK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Giovani Virza Amallia
STIE Perbanas Surabaya
Email : gvnvirsa@gmail.com

Muazaroh
STIE Perbanas Surabaya
Email : muaz@perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36

ABSTRACT

Political connection is a resource for banks. Political connected bank can get many advantage from the government. The objective of the research is to examine the effect of political connection on bank performance using independent comissioner as moderating variable in Indonesian Bank. This study used 28 banks as sample : 14 as political connected banks and 14 non political connected banks. The research period was 2014-2017. The result shows that political connection had a significant positive effect on bank performance, while independent comissioner can not weaken the influent of political connection on bank performance. The implication of the result show that political connected banks have advantage from the government by getting cheaper funding. As a result political connected banks can increase bank performance.

Keywords: Bank Performance, Political Connections, and Independent Commissioner

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir industri perbankan telah mengalami perkembangan cukup pesat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya persentase nasabah dalam memanfaatkan produk dan jasa bank. Dengan berkembangnya industri perbankan ini juga perlu diperhatikan bagaimana perusahaan dapat menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk memberikan kemajuan pada bank itu sendiri. Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat ditempuh dengan beberapa cara. Diantaranya dengan mempertimbangkan tolak ukur pencapaian tujuan bank yaitu melalui kinerjanya. Pengukuran kinerja ini dapat diukur dengan kinerja bank melalui perhitungan rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio ini memanfaatkan informasi laba bersih sebelum pajak yang dihasilkan terhadap total aset yang dimiliki oleh bank.

Selain itu, terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bank. Salah satunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan bank itu berada. Lingkungan ini dinamakan sebagai lingkungan politik. Bank dapat memiliki sumber pendanaan dengan akses mudah karena adanya koneksi politik. Menurut Faccio *et. Al.*, (2006) bank yang memiliki koneksi politik adalah bank dimana terdapat individu atau kelompok dari

direksi, anggota dewan komisaris, komisaris independen, para pemegang saham, maupun kerabat adalah pemegang jabatan politik atau dapat dikatakan sebagai politikus.

Hal tersebut memberikan dampak tersendiri bagi bank yang terkoneksi politik. Diantaranya yaitu dampak negatif yang dihasilkan dari perusahaan di industri perbankan apabila terkoneksi politik ialah memburuknya kinerja bank itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan mudahnya sumber daya yang diperoleh bank, dimana pengembalian sumber daya tersebut memiliki risiko yang tinggi. Diantaranya biaya untuk pengembalian sumber daya yang tidak terjangkau, sehingga dapat mengurangi hasil akhir dari keuntungan bank.

Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bank yang terkoneksi politik terhadap kinerjanya, bank memerlukan seseorang yang dapat bertindak secara adil. Dimana hal yang dilakukan semata-mata demi kepentingan bank. Peran seseorang tersebut akan menduduki jabatan yang berpengaruh pada suatu pengambilan keputusan bank. Agar tercapainya tujuan bank yang tepat sesuai dengan praktik *corporate governance*, bank memerlukan pengangkatan anggota dewan selaku fungsi pengawasan dari luar bank. Apabila komposisi keangotaan dewan dari luar bank semakin besar, maka dapat dianggap semakin independen. Keanggotaan dewan ini disebut dengan komisaris independen.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lain, maupun para pemegang saham. Sehingga peran komisaris independen pada bank yaitu dapat mengontrol setiap keputusan yang akan diambil oleh bank untuk mencapai tujuan bank dan dapat memastikan bahwa bank telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Selain itu, adanya komisaris independen juga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang baik, serta dapat menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan para direksi bank termasuk pada pengawasan kinerja bank tersebut.

Dengan demikian, adanya peran komisaris independen pada perusahaan khususnya di industri perbankan yang memiliki koneksi politik diharapkan dapat menekan adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Dimana dampak negatif tersebut akan mempengaruhi kinerja bank itu sendiri. Apabila komisaris independen dapat menggunakan independensinya dengan baik serta dapat bekerja secara efektif dalam pemantauan kinerja, maka bank yang terkoneksi politik tidak dapat semena-mena menggunakan haknya untuk mendapatkan kemudahan akses sumberdaya. Sehingga hal tersebut tidak akan memberikan dampak memburuknya kinerja bank karena pengurangan keuntungan yang diperoleh. Dengan hal ini, peran komisaris independen dapat dijadikan sebagai pemoderasi dalam keterkaitan antara bank yang memiliki koneksi politik terhadap kinerja banknya.

Sebagai bahan pembahasan penelitian ini juga mengkaji penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009) menunjukkan hasil jika kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Tri Wulandari (2013) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh secara negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maaloul, *et. Al.*, (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara koneksi politik dengan kinerja dan nilai perusahaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh koneksi

politik terhadap kinerja bank yang dihasilkan, serta mengetahui peran komisaris independen sebagai pemoderasi.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank

Perusahaan yang terkoneksi politik pada umumnya dapat menerima beberapa keuntungan diantaranya adalah kekuatan pasar, sumber pendanaan, hingga menjalin kontrak berupa proyek dengan pemerintah (Wijantini, 2007). Namun, apabila perusahaan pada industri perbankan dengan mudah memperoleh pinjaman dana, maka dapat dengan mudah juga meningkatkan hutang bagi bank. Sehingga hal ini juga dapat menjadi beban bank yang mempengaruhi kinerja suatu bank yang kian memburuk. Hal seperti ini sangatlah mungkin terjadi apabila bank yang memiliki hutang dengan jumlah yang tinggi dan mengakibatkan pembayaran beban bunga yang tinggi pula.

Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan (Tri Wulandari, 2013). Wijantini (2007) menyatakan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, Su dan Fung (2013) juga menyatakan jika koneksi politik dapat memberikan pengaruh positif bagi suatu kinerja perusahaan, khususnya dari segi pendanaan.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Kinerja merupakan istilah yang digunakan untuk kegiatan yang telah dilakukan perusahaan berupa kegiatan operasional pada periode waktu tertentu dengan memerhatikan hal-hal yang berkaitan dimasa lalu, seperti biaya yang telah diproyeksikan, dengan didasari efisiensi serta pertanggung jawaban atau akuntabilitas (Srimindarti, 2004). Kinerja bank mengalami peningkatan jika bank diindikasikan terkoneksi politik. Sehingga dapat dikatakan bank telah mencapai tujuannya, dengan penilaian indikator *Return on Asset* (ROA). Namun, pernyataan ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Kemudahan akses yang diperoleh bank terkoneksi politik tersebut dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka diperlukan suatu peran yang bertindak mengawasi kegiatan bank. Peran tersebut dapat terlaksana melalui adanya komisaris independen, yang diharapkan dapat mengawasi secara lebih independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan bank. Peran tersebut dapat terlaksana melalui adanya komisaris independen, yang diharapkan dapat mengawasi secara lebih independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan bank.

Adanya peran komisaris independen ini merupakan salah satu penerapan prinsip *good corporate governance.* Dimana *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan wewenang para pihak-pihak utama dalam suatu perusahaan (Agustia, 2013).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran untuk merumuskan hipotesis pada penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut :

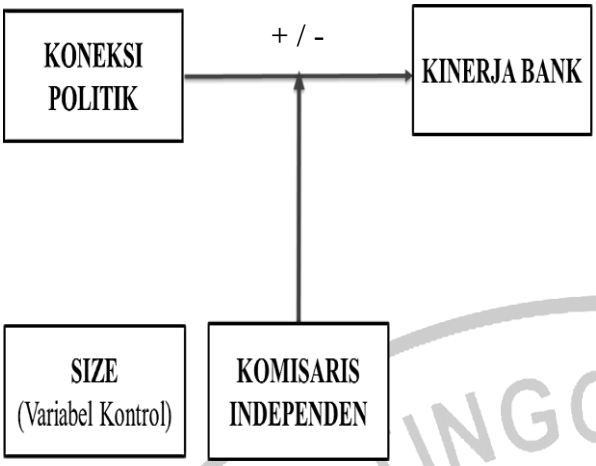

Gambar 1
KERANGKA PEMIKIRAN

Dari hasil kerangka pemikiran diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank.

H_2 : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sekumpulan informasi yang dijelaskan berupa angka dan dapat dianalisis untuk melakukan proses pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Adapun berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang telah ada (murni). Sehingga dapat mengetahui perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini juga merupakan studi kausal dan historis, dimana dilakukan agar mengetahui hubungan saling mempengaruhi antar variabel dengan menggunakan pengujian hipotesis serta mempertimbangkan peristiwa yang telah terjadi. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong sebagai penelitian yang menggunakan panel data. Dimana panel data adalah data yang digunakan dalam penelitian berasal dari banyak perusahaan dan banyak waktu. Selain itu, berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari website www.ojk.go.id.

Identifikasi Variabel

Pada penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu : variabel dependen (Kinerja Bank), variabel independen (Koneksi Politik), variabel moderasi (Komisaris Independen), dan variabel kontrol (Size).

Definisi Operasional Variabel

Kinerja Bank (ROA)

Kinerja merupakan hasil dari rangkaian proses manajemen perusahaan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diinginkan (Moerdiyanto, 2011). Pada penelitian ini pengukuran kinerja bank melalui indikator *Return on Asset* (ROA) pada rasio profitabilitas. Indikator ROA digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola keseluruhan investasi yang dimiliki. informasi ROA suatu perusahaan dapat di akses melalui laporan tahunan pada website www.ojk.go.id maupun website masing-masing bank.

Koneksi Politik

Koneksi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perusahaan khususnya dibidang perbankan yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah maupun pengurus perusahaan tersebut memangku kepentingan pada politik. Sebagai contoh perusahaan dibidang perbankan milik pemerintah atau pemerintah daerah ialah BUMN dan BPD. Pengukuran koneksi politik ini menggunakan variabel dummy. Dimana bank yang terkoneksi politik dengan menggunakan kode 1, sedangkan untuk bank yang tidak terkoneksi politik dengan kode 0.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris lain, dan para pemegang saham sehingga dapat memengaruhi pengambilan suatu keputusan pada perusahaan. Komisaris independen ini dapat diukur menggunakan rumus :

$$K.\ IND = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}} \times 100\%$$

Ukuran Bank *(Size)*

Ukuran bank merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu bank dengan menggunakan informasi total aset yang dimiliki. Adapun pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Size = \ln Total\ Assets$$

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi perusahaan bidang perbankan di Indonesia periode 2014-2017. Dari populasi yang telah ditentukan tersebut, penulis menggunakan metode *purposive sampling* hingga mendapatkan sampel Bank Umum Nasional Devisa dengan kriteria pemilihan bank yang terkoneksi politik : (1) Direksi atau anggota dewan komisaris memangku jabatan sebagai anggota MPR periode 2014-2019, atau (2) Direksi atau anggota dewan komisaris memangku jabatan sebagai anggota Kabinet Menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019, atau (3) Para pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham sebesar ≥ 5% sedang memangku jabatan sebagai anggota MPR/Menteri, atau (4) Bank yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, seperti BUMN dan BPD, atau (5) Bank yang merupakan bukan jenis bank campuran maupun bank asing.

Selain itu, bank yang tidak terkoneksi politik juga menjadi sampel pada penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai pembanding. Adapun kriteria yang digunakan : (1) Direksi atau anggota dewan komisaris tidak memangku jabatan sebagai anggota MPR periode 2014-2019, atau (2) Direksi atau anggota dewan komisaris tidak memangku jabatan sebagai anggota Kabinet Menteri pada pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019, atau (3) Para pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham sebesar ≥ 5% tidak sedang memangku jabatan sebagai anggota MPR/Menteri, atau (4) Bank yang memiliki total aset mendekati bank yang terkoneksi politik, atau (5) Bank yang merupakan bukan jenis bank campuran maupun bank asing.

Teknik Analisis Data

Untuk mengalisis data dari penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank (ROA) dengan jumlah komisaris independen sebagai variabel moderasi sehingga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel tersebut. Setelah melakukan analisis deskriptif pada masing-masing variabel, penulis menguji variabel independen dan variabel dependen yang digunakan. Pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS.

Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan guna mengetahui gambaran umum masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif. Variabel-variabel pada penelitian ini dianalisis hingga menunjukkan bahwa sampel yang digunakan akan ditampilkan berdasarkan nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi selama periode penelitian.

Uji Interaksi (MRA)

Tujuan dari analisis regresi dengan moderasi yaitu untuk mengetahui apakah variabel moderasi dalam sebuah penelitian dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). MRA merupakan aplikasi khusus regresi dimana dalam persamaan regresinya menambahkan variabel perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasinya. Pada penelitian ini, MRA digunakan untuk menguji peran komisaris independen dapat memperlemah adanya dampak negatif perusahaan yang terkoneksi politik terhadap kinerja banknya. Adapun rumus persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e}$$
$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_3 + e}$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Bank (ROA)
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi
- β_2 = Koefisien regresi
- β_3 = Koefisien regresi
- β_4 = Koefisien regresi
- X_1 = Koneksi Politik
- X_2 = Size
- X_3 = Komisaris Independen
- e = Error

Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menjelaskan variasi variabel dependen, atau dapat diartikan besarnya kontribusi seluruh variabel independen secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen. Sehingga sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model (Ghozali, 2005). Nilai R^2 yaitu berada di ($0 < R^2 < 1$). Hal tersebut menunjukkan jika semakin besar nilai R^2 semakin besar kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen yang terdapat dalam model MRA secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis menggunakan uji t dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika nilai Sig. ≥ 0,05 maka dapat dikatakan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan jika variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Sebaliknya, jika nilai Sig. < 0,05 maka dapat dikatakan H1 diterima. Hal ini menunjukkan jika variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

UJI HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Kinerja Bank (ROA)

Adapun hasil analisis deskriptif mengenai kinerja bank yang dilihat melalui ROA, baik dari bank terkoneksi politik maupun bank yang tidak terkoneksi politik sebagai berikut :

Tabel 1
HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF KINERJA BANK (ROA)

ROA	Terkoneksi Politik (%)	Tidak Terkoneksi Politik (%)
Minimum	0,90	-4,90
Maximum	4,73	4,00
Rata-Rata	2,59	1,34
Std. Deviasi	0,77	1,39

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel hasil deskriptif kinerja bank diatas, menunjukkan bahwa ROA terendah pada bank terkoneksi politik sebesar 0,90%. Hasil tersebut diperoleh PT. BPD DKI pada tahun 2015. PT. BPD DKI mengalami penurunan laba yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan PT. BPD DKI dapat dikatakan belum mampu

mengelola aset yang dimiliki secara efisien untuk dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi.

Sebaliknya, ROA terendah pada bank tidak terkoneksi politik sebesar -4,90%. Hasil tersebut dimiliki oleh PT. Bank Permata, Tbk pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan jika PT. Bank Permata, Tbk pada tahun 2016 tidak mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Dimana PT. Bank Permata, Tbk mengalami kerugian sebesar 1,51% akibat penurunan laba yang dihasilkan dari tahun sebelumnya. Penurunan laba ini diakibatkan meningkatnya beban operasional bank, sehingga berpengaruh pada laba yang dihasilkan bank. Rugi bersih yang dimiliki PT. Bank Permata Tbk tidak sebanding dengan total asetnya dan mengakibatkan ROA bernilai negatif.

Pemerolehan ROA tertinggi pada bank terkoneksi politik yaitu sebesar 4,73%. ROA tersebut dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2014. Persentase ROA ini tercatat sebagai nilai ROA tertinggi yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada empat tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2017. Peningkatan ini sebesar 14,35% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjukkan jika bank memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengelolaan asetnya. Sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi bagi bank itu sendiri.

Selain itu, PT. Bank Central Asia, Tbk juga memiliki ROA tertinggi pada bank yang tidak terkoneksi politik. Pemerolehan ROA tersebut pada tahun 2016. Hal ini juga menunjukkan bahwa PT. Bank Central Asia efisien dalam pengelolaan asetnya. Dari keseluruhan bank yang terkoneksi politik memiliki rata-rata ROA sebesar 2,59%, sedangkan bank yang tidak terkoneksi politik sebesar 1,34%.

Dapat dilihat bahwa ROA yang dimiliki bank terkoneksi politik lebih tinggi dibanding bank yang tidak terkoneksi politik. Hal ini disebabkan banyaknya proyek pemerintah yang dipercayakan pada bank terkoneksi politik, sehingga berdampak pada pemerolehan laba bank yang tinggi bagi bank. Selain itu, standar deviasi pada bank yang terkoneksi politik menunjukkan sebesar 0,77% dan pada bank tidak terkoneksi politik sebesar 1,39%.

Uji Deskriptif Komisaris Independen

Adapun hasil uji analisis deskriptif yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut :

Tabel 2
HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen	Terkoneksi Politik (%)	Tidak Terkoneksi Politik (%)
Minimum	33,33	40
Maximum	100	80
Rata-Rata	58,02	55,92
Std. Deviasi	11,77	8,21

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data komposisi komisaris independen diatas, menunjukkan bahwa bank yang terkoneksi politik memiliki persentase terendah sebesar 33,33%. Komposisi ini dimiliki oleh PD. BPD Kalimantan Timur dan PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada tahun 2016. Sebaliknya pada bank yang tidak terkoneksi politik memiliki komposisi komisaris independen terendah dengan persentase sebesar 40%. Persentase komposisi komisaris independen tersebut pada PT. Bank BRI Syariah tahun 2016 dan PT. Bank Mega, Tbk tahun 2017. Persentase ini dapat dikatakan kurang independen, dikarenakan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa dalam suatu bank minimal memiliki komisaris independen dengan komposisi 50% dari jumlah anggota dewan komisaris yang ada.

Pada bank terkoneksi politik yang menunjukkan komposisi komisaris independen tertinggi sebesar 100%.

Dimana persentase komisaris independen ini dimiliki oleh PT. BPD Riau Kepri pada tahun 2014. Komposisi ini terdiri dari tiga anggota komisaris independen. Sehingga bank ini diyakini dapat melakukan prinsip tata kelola yang baik dikarenakan fungsi pengawasan independen yang baik. Selain itu, bank yang tidak terkoneksi politik juga memiliki komposisi komisaris independen tertinggi sebesar 80%. Komposisi ini merupakan persentase komisaris independen tertinggi selama empat tahun terakhir yang dimiliki PT. Bank BRI Syariah. Komposisi komisaris independen PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2014 ini terdiri dari empat komisaris independen dan satu dewan komisaris.

Rata-rata komposisi komisaris independen pada bank yang terkoneksi politik sebesar 58,02%, sedangkan pada bank yang tidak terkoneksi politik sebesar 55,92%. Komposisi komisaris independen pada bank yang terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang tidak terkoneksi politik. Hal ini disebabkan bank yang terkoneksi politik memiliki komposisi diatas 50%, sebaliknya bank yang tidak terkoneksi politik mayoritas komposisi komisaris independen yang dimiliki hanya 50%. Adapun penyebaran data pada penelitian ini ditunjukkan melalui standar deviasi. Standar deviasi mengenai komposisi komisaris independen pada bank terkoneksi politik sebesar 11,77%, sedangkan pada bank yang tidak terkoneksi politik sebesar 8,21%.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Berikut hasil uji analisis regresi liner berganda yang telah dilakukan :

Tabel 3
HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR HIPOTESIS KEDUA (H_1)

Variabel	Koof	t hit	Sig.
(Constant)	-3,65	-2,33	0,02
K_Pol	1,31	6,40	0,00
Size	0,27	3,20	0,00
R^2	0,30		
F hit	23,85		
Sig. F	0,00		

Sumber : Data Diolah

Tabel 4
HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR HIPOTESIS KEDUA (H_2)

Variabel	Koof	t hit	Sig.
(Constant)	-3,98	-2,02	0,05
K_Pol	1,25	1,00	0,32
Size	0,28	3,19	0,00
Kind	0,00	0,27	0,79
Moderasi	0,00	0,04	0,97
R^2	0,31		
F hit	11,80		
Sig. F	0,00		

Sumber : Data Diolah

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank

Berdasarkan hasil pengujian tabel 3, menunjukkan bahwa nilai t hitung koneksi politik sebesar 6,40. Dimana nilai ini lebih besar dari nilai pada t tabel yaitu 1,96. Jika dinilai dari tingkat signifikansi koneksi politik sebesar 0,00. Artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini dapat membuktikan jika H_1 diterima, dimana hipotesis ini menyatakan jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap ROA.

Pada penelitian ini bank yang terkoneksi politik merupakan bank yang identik dengan kepemilikan pemerintah atau negara, seperti BUMN dan BPD. Disamping itu, bank yang diindikasikan memiliki koneksi politik ialah bank yang salah satu *top officer* didalamnya memangku jabatan pada kabinet menteri atau MPR pada era pemerintahan Joko

Widodo tahun 2014-2019. Dengan demikian, bank yang terkoneksi politik tersebut memiliki berbagai keuntungan yang dapat membantu kepentingan bank. Keuntungan tersebut diantaranya kemudahan akses sumber pendanaan dari pihak pemerintah.

Selain itu, proyek-proyek infrastruktur jangka panjang yang dimiliki pemerintah banyak dipercayakan pada bank yang terkoneksi politik. Dimana bank yang terkoneksi politik dapat memberikan kredit pada pihak pemerintah, sehingga memungkinkan pendapatan bunga yang diperoleh pun lebih tinggi. Kredit yang dimaksud ialah jenis kredit sindikasi. Disamping itu, kredit yang ditawarkan bank yang terkoneksi politik untuk masyarakat pun lebih murah, sehingga hal ini dapat membantu bank dalam mempertahankan persaingan pasarnya. Pernyataan ini didukung oleh Chen *et. Al.*, (2014) yang menyatakan bahwa bank yang terkoneksi politik lebih mudah mempertahankan persaingannya dibanding dengan bank yang tidak memiliki koneksi politik.

Bank yang terkoneksi politik memiliki kepercayaan nasabah yang kuat. Hal ini diyakini para nasabah jika bank milik pemerintah atau negara tidak akan mudah di likuidasi. Selain itu, dari segi infrastruktur kantor cabang maupun fasilitas yang diberikan bank yang terkoneksi politik juga lebih unggul dibandingkan dengan bank yang tidak terkoneksi politik. Sehingga hal ini menarik perhatian masyarakat untuk lebih mempercayakan kegiatan transaksinya pada bank yang terkoneksi politik dengan rasa aman dan nyaman.

Disamping itu, kinerja bank yang memiliki koneksi politik pun juga cenderung lebih baik dibandingkan dengan bank yang tidak terkoneksi politik. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis deskriptif yang telah dilakukan peneliti. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada pengukuran ROA pun juga menunjukkan jika ROA yang dimiliki bank terkoneksi politik lebih tinggi dibanding dengan ROA bank yang tidak terkoneksi politik.

Tingkat ROA pada bank yang tidak terkoneksi politik terdapat nilai negatif. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh bank berfluktuasi karena kegiatan operasional bank yang tidak menentu. Lain halnya dengan bank yang terkoneksi politik yang mendapat dukungan dari pemerintah untuk kegiatan operasionalnya, baik itu berupa proyek maupun sumber pendanaan. Tidak hanya itu saja, kegiatan yang berkaitan dengan keuangan para pegawai pemerintah atau negara dilakukan melalui akses bank yang terkoneksi politik yaitu BUMN dan BPD. Sehingga hal ini berdampak pada kinerja bank yang terkoneksi politik menjadi lebih unggul dibanding dengan bank yang tidak terkoneksi politik. Akibat tingginya kegiatan operasional yang dimiliki bank yang terkoneksi politik, memungkinkan bank melakukan perluasan aset hingga pemerolehan laba yang tinggi.

Hal ini didukung oleh penelitian Wijantini (2007) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif pada kinerja bank, terlebih bagi bank yang sedang mengalami tekanan keuangan. Dimana bank yang memiliki tekanan keuangan, seperti bank yang terkoneksi politik akan lebih mudah memperoleh sumber pembiayaan dari pemerintah. Selain itu, adanya proyek yang diberikan pemerintah juga dapat mempengaruhi laba bank yang meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh tingkat biaya tidak langsung yang dibebankan secara berbeda dari bank yang terkoneksi politik dan bank yang tidak terkoneksi politik.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Tri Wulandari (2013) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif pada suatu kinerja perusahaan. Dimana kemudahan yang diberikan, seperti halnya kemudahan akses hutang akan mempengaruhi struktur modal bank. Struktur modal akan didominasi oleh

hutang dengan bunga yang diberikan tidaklah sedikit. Sehingga hal ini dapat mengurangi laba yang diperoleh bank. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut dikarenakan sampel penelitian yang digunakan pada industri yang berbeda.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Setelah mengetahui hasil pengujian sebelumnya, jika koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank. Dilakukan pengujian kembali untuk hipotesis kedua (H_2), hipotesis ini menguji peran komisaris independen sebagai pemoderasi. Variabel moderasi yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu hasil perkalian dari koneksi politik dengan komisaris independen.

Dari hasil uji pada tabel 4, menunjukkan jika variabel pemoderasi memiliki nilai signifikansi lebih dari dari 0,05. Dimana nilai yang dihasilkan yaitu 0,97 > 0,05. Sehingga hal ini dapat dikatakan jika H_2 ditolak. Pernyataan mengenai komisaris independen dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank (ROA) tidak dapat dibenarkan.

Komisaris independen pada suatu bank berperan sebagai fungsi pengawasan yang memastikan jika bank telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Apabila bank telah menerapkan prinsip ini melalui pemberdayaan dewan komisaris, maka diyakini bank dapat lebih mudah mencapai tujuannya. Komisaris independen dipilih dengan kriteria yang profesional dan memiliki kompetensi. Komisaris independen diangkat dari luar bank. Hal ini bertujuan agar komisaris lebih independen dan dapat mengesampingkan kepentingan pribadi dan semata-mata demi kepentingan bank.

Pada penelitian ini komisaris independen tidak memoderasi pengaruh bank yang terkoneksi politik terhadap ROA yang dihasilkan. Herawaty (2009) menyatakan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* dengan adanya komisaris independen tidak mempengaruhi laba yang dihasilkan suatu perusahaan. Menurut Darwis (2009) juga menyatakan bahwa peran komisaris independen tidak mempengaruhi kinerja perusahaan, melainkan hanya sebagai bentuk formalitas untuk memenuhi regulasi saja.

Peran komisaris independen pada bank yang terkoneksi politik hanya berfungsi sebagai pengawasan terhadap operasional bank. Komisaris independen memastikan bahwa bank telah memiliki informasi, sistem pengendalian, maupun sistem audit dengan baik. Selain itu, komisaris independen juga memastikan bank dapat menerapkan strategi bisnis dengan baik dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, bank yang terkoneksi politik mampu menghasilkan ROA yang lebih unggul dibanding dengan bank yang tidak terkoneksi politik. Dimana bank yang terkoneksi politik mampu menerapkan manajemen yang baik, tanpa adanya campur tangan komisaris independen. Peran komisaris independen hanya menjalankan fungsi sebagai pihak pengawasan.

Bank yang memiliki koneksi politik sangatlah mungkin mendapatkan kemudahan akses sumber daya dari pihak pemerintah. Namun, karena adanya pengawasan dari komisaris independen bank tidak dapat semena-mena memanfaatkan akses tersebut untuk kepentingan bank itu sendiri. Sehingga bank perlu menekankan kemampuan manajemen bank dengan baik agar laba yang dihasilkan pun tetap meningkat. Salah satu hal yang mempengaruhi bank yang terkoneksi politik dapat memiliki ROA lebih tinggi ialah kemampuan manajemen bank itu sendiri.

Penerapan manajemen bank yang baik tersebut seperti pada saat proses penawaran kredit. Kredit yang ditawarkan bank yang terkoneksi politik cenderung memiliki bunga yang lebih murah,

sehingga menarik minat masyarakat. Banyaknya masyarakat yang berminat dalam penggunaan kredit bank yang terkoneksi politik, bank juga selektif dalam penilaian latar belakang krediturnya. Dimana hal ini mampu menekan adanya kredit macet, sehingga dapat mengurangi risiko yang ada dan tetap dapat meningkatkan perolehan laba bank.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank dengan menggunakan komisaris independen sebagai pemoderasi pada dua puluh delapan Bank Umum Nasional Devisa. Dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Hipotesis pertama (H_1) yaitu koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank dapat diterima. Bank yang terkoneksi politik memiliki ROA lebih tinggi dibanding dengan bank yang tidak terkoneksi politik. Sehingga dapat disimpulkan jika koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank yang diukur melalui ROA. (2) Hipotesis kedua (H_2) yaitu komisaris independen dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank ditolak. Hal ini disebabkan manajemen bank dapat melakukan pengelolaan kegiatan operasionalnya dengan baik tanpa bergantung pada peran komisaris independen.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperhatikan beberapa keterbatasan berikut : (1) Terbatasnya bank yang memiliki koneksi politik pada periode penelitian. Dimana penelitian ini hanya mendapatkan bank BUMN dan BPD sebagai sampel terkoneksi politik. (2) Pengukuran kinerja bank pada penelitian ini hanya menggunakan ROA yang berfokus jangka pendek. (3) Tolak ukur koneksi politik hanya sebatas *top officers*, pemegang saham ≥ 5%. Sehingga kemungkinan sampel terkoneksi politik sangatlah kecil. (4) Periode pengamatan pemerintah Joko Widodo periode 2014-2017.

Adapun saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu : (1) Kriteria sampel terkoneksi politik tidak hanya kabinet menteri dan anggota MPR saja, melainkan pejabat militer, politisi yang berafiliasi dengan partai politik, atau pejabat pemerintahan lainnya.(2) Pengukuran kinerja bank dapat menggunakan rasio lain yang dipandang lebih bisa menjadi indikasi untuk penilaian investor baik dimasa lalu dan masa depan. Rasio ini dapat diukur melalui rasio pasar. (3) Periode penelitian perlu ditambah agar dapat memberikan gambaran pasti mengenai fenomena penelitian ini. (4) Faktor pemoderasi juga dapat menggunakan penerapan *good corporate governance* selain komisaris independen, diantaranya dewan komisaris, dewan direksi, maupun komite audit.

DAFTAR RUJUKAN

Agustia, D., (2013). Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *15*(1), pp.27-42.

Chen, Y., Luo, D. and Li, W., (2014). Political connections, entry barriers, and firm performance. *Chinese Management Studies*, *8*(3), pp.473-486.

Darwis, H., (2009). Corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, *13*(3).

Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, pp Vol.96, No.1, 369-386.

Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herawaty, V. (2009). Peran praktek corporate governance sebagai moderating variable dari pengaruh earnings management terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *10*(2), 97-108.

Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.

Maaloul, A., Chakroun, R. and Yahyaoui, S., (2018). The effect of political connections on companies' performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, *8*(2), pp.185-204.

Moerdiyanto, (2011). Pengaruh Tingkat Pendidikan Manajer Terhadap Kinerja Perusahaan Go-Public. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, XXX(1), pp. 116-129.

Srimindarti, Ceacilia. (2004). *Balanced Scorecard* Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja. Fokus Ekonomi. Vol. 3, No. 1, April.

Su, Z.Q. and Fung, H.G., (2013). Political Connections and Firm Performance in Chinese Companies. *Pacific Economic Review*, *18*(3), pp.283-317.

Tri Wulandari, R. (2013). Analisis Pengaruh Political Connection dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 2, No.1, 1-12.

Wijantini. (2007). A Test The Relationship Between Political Connection And Indirect Cost of Financial Distress In Indonesia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, pp. Vol.3, No.2,61-8.